

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Identifikasi Perkembangan Harga

Perkembangan harga bahan kebutuhan pokok penting (bapokting), barang lainnya, dan jasa di Kabupaten Ciamis pada Triwulan I 2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan tekanan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H. Kondisi ini mencerminkan pengaruh simultan faktor musiman, distribusi pasokan, serta ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan pangan.

Sebagai daerah non-IHK, pemantauan inflasi Kabupaten Ciamis mengacu pada **Indeks Perkembangan Harga (IPH)**, dengan **IHK Kota Tasikmalaya** digunakan sebagai indikator proksi regional Priangan Timur serta **inflasi Provinsi Jawa Barat** sebagai pembanding makro.

Pada Januari 2025, IPH Kabupaten Ciamis mencatat tekanan harga di awal tahun, dengan IPH sebesar **3,28% pada Minggu I** dan meningkat menjadi **3,35% pada Minggu II**, sebelum melandai menjadi **2,74% pada Minggu III**. Tekanan harga tersebut terutama dipengaruhi oleh komoditas hortikultura dan bahan pangan segar yang sensitif terhadap cuaca.

Memasuki Februari 2025, terjadi **deflasi IPH** sebesar **-1,36% pada Minggu I** dan **-1,25% pada Minggu II**, terutama disumbang oleh penurunan harga **cabai merah**, sejalan dengan tren deflasi hortikultura di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan membaiknya pasokan pascapanen serta efektivitas distribusi antar wilayah.

Namun demikian, pada Maret 2025, IPH kembali meningkat menjadi **2,52%**, menandakan munculnya tekanan inflasi seiring peningkatan permintaan menjelang HBKN. Harga **cabai rawit merah** tercatat meningkat hingga **Rp98.750/kg**, sementara komoditas protein hewani seperti **daging ayam ras** berpotensi menjadi kontributor inflasi musiman. Harga **daging sapi** relatif stabil di kisaran **Rp136.250/kg**.

Dari sisi regional, inflasi **year-on-year Kota Tasikmalaya** meningkat dari **1,32% (Desember 2024)** menjadi **1,94% (Februari 2025)**, mencerminkan tekanan inflasi yang mulai menguat di Priangan Timur. Sementara itu, inflasi tahunan **Provinsi Jawa Barat Januari 2025** sebesar **0,79%**, masih berada di bawah target nasional, meskipun kelompok **Makanan, Minuman, dan Tembakau** tetap menjadi penyumbang inflasi utama.

Risiko inflasi ke depan perlu diwaspadai, terutama:

- Peningkatan permintaan pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri,
- Ketergantungan pasokan komoditas tertentu pada daerah lain dan impor,
- Gangguan produksi akibat curah hujan tinggi,
- Kenaikan biaya pakan, distribusi, serta potensi spekulasi dan penimbunan.

Berdasarkan perkembangan tersebut, TPID Kabupaten Ciamis menilai bahwa tekanan inflasi pada Triwulan I 2025 bersifat musiman dan terkonsentrasi pada komoditas pangan tertentu, sehingga memerlukan langkah antisipatif yang terfokus menjelang HBKN melalui penguatan

pasokan, pengawasan distribusi, dan stabilisasi harga komoditas berisiko inflasi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Di Daerah

Berdasarkan pemantauan TPID, terdapat beberapa permasalahan utama yang memengaruhi efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis:

1. Kualitas dan Konsistensi Data Harga

Meskipun pemantauan harga dilakukan secara rutin, masih terdapat ketidaklengkapan input data pada beberapa periode, khususnya pada bulan Februari 2025. Hal ini berpotensi mengurangi ketepatan analisis dan memperlambat respons kebijakan.

2. Ketidakpastian Produksi dan Pasokan Pangan

Produksi pangan strategis sangat dipengaruhi faktor musiman dan kondisi iklim. Curah hujan tinggi berisiko mengganggu produksi hortikultura dan beras. Selain itu, proyeksi defisit beberapa komoditas pangan strategis di Jawa Barat pada 2025 meningkatkan risiko tekanan harga di daerah.

3. Distribusi dan Logistik yang Belum Optimal

Kendala distribusi dari sentra produksi ke pasar, khususnya ke wilayah tertentu, berpotensi meningkatkan disparitas harga. Kerja sama antar daerah masih perlu diperluas untuk menutup kesenjangan pasokan.

4. Perilaku Pasar dan Keterbatasan Fiskal

Potensi spekulasi dan penimbunan menjelang HBKN masih menjadi risiko utama. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan fleksibilitas pembiayaan daerah menuntut pengelolaan intervensi yang lebih tepat sasaran.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi TPID Kabupaten Ciamis, berbagai kebijakan pengendalian inflasi telah dilaksanakan secara terintegrasi dalam kerangka **4 Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K)**:

1. Keterjangkauan Harga

1. Pemantauan harga harian di pasar utama sebagai dasar pengambilan kebijakan stabilisasi harga.

Pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), khususnya pada

2. komoditas pangan strategis.
3. Penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjaga daya beli.

2. Ketersediaan Pasokan

1. Pengelolaan stok pangan melalui koordinasi dengan Bulog dan pelaku usaha pangan.
2. Dukungan sektor pertanian melalui bantuan sarana produksi pertanian dan perbaikan infrastruktur irigasi.
3. Penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) hingga Maret 2025.
4. Fasilitasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan subsidi resi gudang.

3. Kelancaran Distribusi

1. Monitoring stok dan distribusi pangan secara berkala oleh Satgas Pangan.
2. Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan menuju sentra produksi pertanian.
3. Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Garut pada Februari 2025 untuk penguatan pasokan.

4. Komunikasi Efektif

1. Pelaksanaan rapat koordinasi TPID secara berkala di tingkat kabupaten dan provinsi.
2. Partisipasi aktif dalam rapat koordinasi pusat dan regional sebagai sarana sinkronisasi kebijakan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah

Evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan I 2025 menunjukkan bahwa inflasi di wilayah Jawa Barat, termasuk Kabupaten Ciamis, masih terkendali dan berada di bawah target nasional. Penurunan harga cabai merah pada awal tahun mencerminkan membaiknya pasokan dan efektivitas intervensi distribusi.

Namun demikian, evaluasi juga menunjukkan perlunya peningkatan konsistensi data harga serta penguatan efektivitas intervensi pasar pada komoditas tertentu yang masih mengalami tekanan harga, seperti bawang putih dan cabai rawit. Selain itu, risiko defisit pangan strategis memerlukan mitigasi yang lebih terstruktur melalui peningkatan produksi dan kerja sama antar daerah.

1. Capaian Positif:

1. Inflasi Provinsi Jawa Barat tetap terkendali di bawah target.
2. Penurunan harga cabai merah menunjukkan perbaikan pasokan.
3. Pemanfaatan sistem pemantauan harga (SILINDA JABAR) semakin mendukung pengambilan kebijakan.

2. Area Perbaikan:

1. Konsistensi dan kelengkapan data harga.
2. Efektivitas intervensi pasar pada komoditas tertentu.

Penguatan mitigasi risiko defisit pangan.

3.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rekomendasi Kebijakan:

Berdasarkan evaluasi Triwulan I 2025, TPID Kabupaten Ciamis merekomendasikan beberapa langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Jangka Pendek (Menjelang HBKN)

- Penguatan pengawasan harga dan distribusi komoditas pangan strategis, serta optimalisasi operasi pasar dan GPM secara lebih terarah.
- Distribusi dan Pengawasan Pasar yang Lebih Terarah, termasuk penegakan hukum terhadap spekulasi (terutama mitigasi risiko harga barang yang diatur pemerintah menjelang HBKN).

2. Jangka Menengah (Tahun 2025)

- Intensifikasi program peningkatan produksi pangan lokal dan perluasan kerja sama antar daerah untuk menjaga kesinambungan pasokan.

3. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan

- Optimalisasi sistem pemantauan harga melalui SILINDA JABAR, peningkatan kapasitas SDM TPID, serta penyediaan fleksibilitas anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk respons cepat pengendalian inflasi.